

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan judul dan topik penelitian yang ditulis oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama, penelitian pertama yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan.” Oleh Tri Noviyanti tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini membahas terkait pelaksanaan suatu kebijakan berdasarkan faktor yang mempengaruhi terjadinya implementasi berdasarkan teori faktor menurut Mazmanian dan Sabatier yang teorinya juga mengacu pada teori usia lanjut oleh Suadirman yang berkaitan dengan permasalahan dan kebutuhan hidup kelompok lanjut usia. Adapun hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Bintaro dari faktor yang mempengaruhi sudah berjalan cukup baik sehingga pemenuhan kebutuhan dasar lansia juga terpenuhi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu terletak pada locus penelitian serta sumber data dan hasil dari penelitian yang akan dilakukan. ⁶

Kedua, Jurnal penelitian berjudul, “Bantuan Sosial bagi Warga Lanjut Usia di Masa Pandemi.” Oleh Sari Handayani pada tahun 2020. Tujuan dari jurnal penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi peran pemerintah dari

⁶ Tri Noviyanti, *Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan*, Jakarta: Skripsi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

tingkat pusat sampai daerah dalam pendistribusian bantuan sosial bagi masyarakat kelompok lanjut usia. Adapun hasil dari jurnal penelitian ini dijelaskan oleh penulis bahwa mayoritas program bantuan yang diberikan kepada lansia di masa pandemic sifatnya tidak rutin melainkan hanya satu waktu, oleh sebab itu diupayakan kembali oleh Kementerian Sosial RI pendistribusian bantuan yang lebih merata melalui program bantuan sosial lainnya. Adapun perbedaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada focus jenis program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat serta proses pendistribusian program bantuan tersebut dan metode penelitian yang digunakan.⁷

Ketiga, Jurnal penelitian berjudul “Efektivitas dan Pengaruh Bansos Terhadap Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung” oleh Anak Agung Dinda Pramisita dan Made Suyana Utama tahun 2020. Adapun tujuan dari penulisan jurnal penelitian ini ialah untuk menganalisis efektivitas bansos bagi penduduk alnsia di Kcamatan mengwi Kabupaten Badung, menganalisis proporsi pemanfaatan bansos bagi penduduk lansia, menganalisis adakah perbedaan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar antara sebelum dan sesudah diberikannya bansos bagi lansia, dan menganalisis adakan perbedaan derajat kesehatan antara sebelum dan sesudah diberikan bansos bagi penduduk lansia. Hasil dari jurnal penelitian terdahulu menunjukkan bansos bagi penduduk lansia di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sangat efektif dilakukan, proporsi pemanfaat

⁷ Sari Handayani, *Bantuan Sosial Bagi Warga Lanjut Usia di Masa Pandemi*, Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2020

seluruh dana bantuan sosial paling banyak dalam hal bidang pangan, terdapat perbedaan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar antara sebelum dan sesudah diberikan bantuan sosial bagi penduduk lansia di kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dan terdapat perbedaan derajat kesehatan antara sebelum dan sesudah diberikan bantuan sosial bagi penduduk lansia di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Adapun perbedaannya terletak pada focus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada satu bentuk program bantuan sosial tunai⁸

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|--|--|
| 1 | Tri Noviyanti Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan | <ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai Kartu Lansia Jakarta - Menggunakan metode penelitian kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> - Teori Ahli yang digunakan - Locus penelitian sumber data dan hasil dari penelitian yang akan dilakukan. |
| 2 | Sari Handayani, Universitas Gadjah Mada | Bantuan Sosial bagi Warga Lanjut Usia di Masa Pandemi. | <ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai Bantuan Sosial secara keseluruhan bagi Lansia | <ul style="list-style-type: none"> - Fokus dalam penelitian ini dikhususkan untuk satu program saja |
| 3 | Anak Agung Dinda Pramisita dan Made Suyana Utama, Universitas Udayana, Bali | Efektivitas Pengaruh Bansos Terhadap Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk | <ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai pengaruh bantuan sosial terhadap peningkatan pemenuhan kebutuhan | <ul style="list-style-type: none"> - Fokus dalam penelitian ini khususkan untuk membahas satu program bantuan sosial |

⁸ Anak Agung Dinda Pramisita, Made Suyana Utama. *Efektivitas Pengaruh Bansos Terhadap Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Lansia Kecamatan Dasar Penduduk Lansia Kabupaten Badung, Bali: Universitas Udayana, 2020.*

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--|
| | | Lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung | dasar Lansia | |
|--|--|--|--------------|--|

(Sumber: Diolah oleh peneliti pada bulan Oktober 2022)

2.2 Kerangka Teori

Dalam sub bab ini, peneliti akan membahas mengenai teori dan model yang akan digunakan dalam penelitian ini dan beberapa teori serta konsep yang berkaitan dengan penelitian ini juga akan dipaparkan oleh peneliti.

2.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan menurut P. Sabatier & Mazmanian yaitu:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi sesudah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat maupun peristiwa-peristiwa.”⁹

2.2.1.1 Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier disebut dengan model Kerangka Analisis Implementasi. Terdapat tiga variable dalam model implementasi Mazmanian dan Sabatier:

⁹ Agus Subianto, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Brilliant, 2020, hal. 17

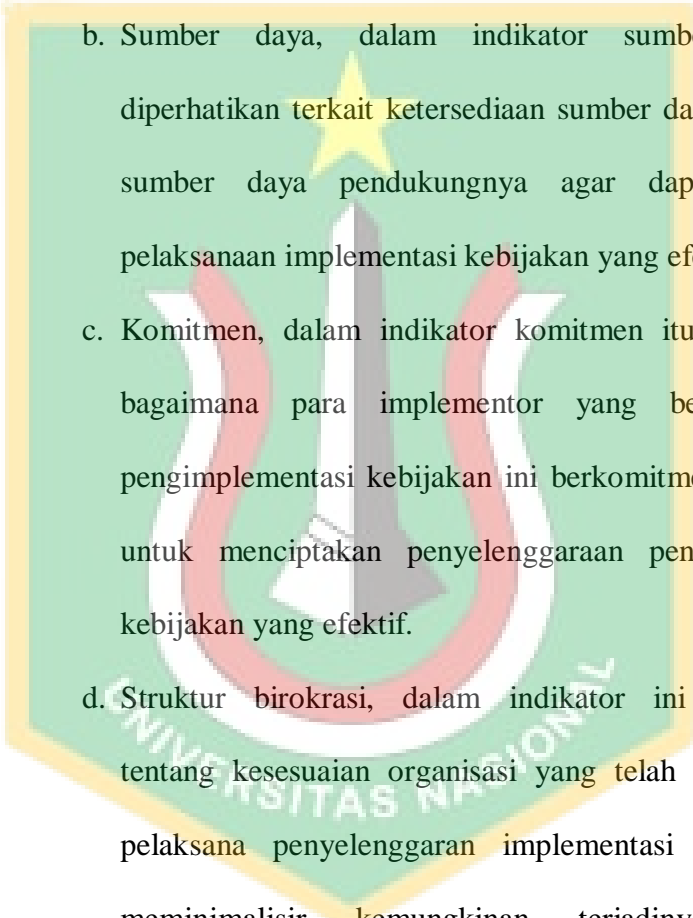
- 1) Variable independent, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, apakah berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki.
- 2) Variable intervening, yaitu kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan.
- 3) Variable dependen, yaitu tahapan proses implementasi dengan lima tahapan mulai dari pemahaman Lembaga atau pelaksana dalam penyusunan kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut serta hasil akhir yang mengarah pada revisi dari kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan.

2.2.1.2 Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Dalam model kebijakan Edward dijelaskan bahwa yang menjadi persoalan dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan public kurangnya perhatian pada masalah yang timbul dalam proses implementasi kebijakan tersebut dan hal tersebut akan menimbulkan ketidakefektivan dalam proses pengimplementasiannya. Adapun empat indikator pokok yang dikemukakan dalam model implementasi George Edward III:

- a. Komunikasi, dalam indikator komunikasi perlu diperhatikan bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dikomunikasikan

kepada organisasi penyelenggara atau kepada masyarakat, kualitas serta ketersediaan sumber daya kebijakan tersebut dan bagaimana sikap dan respon dari pihak-pihak yang terlibat serta struktur organisasi pelaksana kebijakan yang ditetapkan.

- 
- b. Sumber daya, dalam indikator sumber daya perlu diperhatikan terkait ketersediaan sumber daya manusia serta sumber daya pendukungnya agar dapat menciptakan pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif.
 - c. Komitmen, dalam indikator komitmen itu memperhatikan bagaimana para implementor yang berkaitan dengan pengimplementasi kebijakan ini berkomitmen serta bersedia untuk menciptakan penyelenggaraan pengimplementasian kebijakan yang efektif.
 - d. Struktur birokrasi, dalam indikator ini memperhatikan tentang kesesuaian organisasi yang telah ditunjuk sebagai pelaksana penyelenggaraan implementasi kebijakan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya bureaucratic fragmentation.

2.2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Implementasi menurut Grindle adalah proses umum tindakan administratif atau politik yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dalam hal ini, program tertentu adalah kebijakan

pemerintah yang telah diproyeksikan secara spesifik dengan desain yang telah ditentukan dan dana yang telah dialokasikan untuk menunjang dan mendukung proses pelaksanaannya.

Terdapat dua variable yang berkaitan dan mempengaruhi pengimplementasi suatu kebijakan public. Pertama adalah bagaimana proses pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan, apakah telah sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan atau direncanakan dan merujuk pada aksi kebijakannya. Variable kedua adalah apakah tujuan dari ditetapkannya kebijakan itu tercapai. Kedua variable ini akan terjawab dilihat dari perubahan yang terjadi pada masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Selain kedua variable tersebut, ukuran keberhasilan dari implementasi kebijakan itu juga dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut terlaksana, seperti:

a) Isi kebijakan (*Content of Policy*) yang meliputi:

1. Adanya kepentingan yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan (*Interest Effected*), dalam hal ini setiap kebijakan dibuat dan diimplementasikan dengan mementingkan adanya dampak yang akan terjadi terhadap suatu aktivitas politik, karena kebijakan yang diimplementasikan akan menimbulkan perubahan dalam hal sosial, politik dan ekonomi dan dapat memicu perlawanan

dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya telah terancam dari adanya pengimplementasian kebijakan yang baru.

2. Adanya manfaat dan dampak positif yang timbul dari pengimplementasian suatu kebijakan (*Type of*

Benefits), dalam hal ini suatu kebijakan yang diimplementasikan tentu juga memiliki macam-macam tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan yang memberikan dampak dan manfaat positif secara kolektif akan mendapatkan banyak dukungan sepanjang kebijakan tersebut diimplementasikan.

3. Terpenuhinya target pencapaian suatu kebijakan dengan menunjukkan derajat perubahan yang disepakati (*Extent of Change Envision*), suatu kebijakan tentu ditetapkan dengan harapan adanya perubahan yang terjadi dari pengimplementasian kebijakan yang baru

4. Tepatnya letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*) yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan, suatu kebijakan tentu berkaitan dengan kewenangan dan hambatan tersendiri dalam proses pengambilan keputusannya baik di dalam tahap tingkat nasional maupun tingkat local serta jumlah

orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu karena akan berdampak pada implementasi dari kebijakan itu.

5. Pelaksanaan program, Terlaksananya program kebijakan (*Program Implementer*) yang kompeten dan

memiliki kapabilitas bagi keberhasilan kebijakan yang diterapkan. Bentuk keputusan yang ditetapkan dalam proses tahapan formulasi kebijakan dapat menunjukkan siapa yang akan ditunjuk dan bertugas melaksanakan berbagai macam program. Bentuk keputusan yang ditetapkan saat proses tahapan perumusan kebijakan juga akan menunjukkan siapa yang berwenang dalam tugas pengimplementasian suatu program yang ada. Hal tersebut menjelaskan bahwa diperlukannya penetapan karena adanya perbedaan peran pada lebih dari satu satuan birokrasi yang dilibatkan dalam suatu pengelolaan program.

6. Sumber daya yang digunakan (*Resource Committed*) dalam proses pengimplementasian kebijakan tersebut memadai sehingga mendukungnya suksesnya kebijakan tersebut dilaksanakan

- a. Lingkungan Implementasi (*Context Of Implementation*), yang meliputi:

1. Ada dan diperlukan suatu pertimbangan terkait adanya kekuatan dan kekuasaan serta strategi (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*) yang akan digunakan oleh para pelaku penyelenggara pengimplementasian kebijakan.
2. Pentingnya karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*) di lingkungan yang akan dilakukannya implementasi kebijakan karena tentu akan mempengaruhi kebijakan tersebut.
3. Adanya tingkat kepatuhan serta respon (*Compliance and Responsive*) dari para pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

2.2.1.4 Model Implementasi yang digunakan dalam penelitian

Dari beberapa model penelitian menurut ahli yang telah peneliti jabarkan, penelitian ini merujuk pada Teori Model Implementasi yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle dengan enam dimensi, yaitu:

- a. Adanya dampak atau manfaat yang timbul dari diimplementasikannya kebijakan ini
- b. Terpenuhinya target pencapaian dan mencapai derajat perubahan yang diharapkan
- c. Pelaksanaan Program

- d. Sumber Daya yang digunakan
- e. Adanya tingkat kepatuhan serta respon para pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan
- f. Adanya kekuasaan, kekuatan serta strategi dari aktor yang terlibat

Peneliti memutuskan untuk menggunakan model implementasi

Marilee S. Grindle sebagai teori dan indikator dalam penelitian Implementasi Program Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kelurahan Pasar Minggu DKI Jakarta guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Teori ini dipilih karena menurut peneliti indikator yang terdapat dalam teori tersebut dapat menjawab apakah kehadiran program bantuan langsung tunai kartu lansia Jakarta berjalan cukup efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan sesuai dengan yang ditujukan

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan warga negara dalam hal material, spiritual dan sosial agar terciptanya kehidupan yang layak serta kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁰

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial

Upaya pemberian layanan bagi lansia dengan usia 60 tahun keatas dengan tujuan membantu lansia dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik serta menciptakan kenyamanan dan ketenangan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik dalam hal jasmani maupun rohani adalah bentuk peningkatan kesejahteraan lansia.

2.2.3 Kartu Lansia Jakarta

Kartu Lansia Jakarta (KLJ) adalah program Pemprov DKI Jakarta guna membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok lanjut usia yang sudah tidak lagi di usia produktif dan tidak lagi dapat mencari nafkah atau menghidupi hidupnya sendiri sehingga harus bergantung dengan orang lain. Adapun pendistribusiannya ialah dengan memberikan kartu ATM Bank DKI kepada penerima manfaat dan bantuan yang diterima sebesar 600.000/bulan dimana dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi lansia atau penerima manfaat.¹¹

2.2.4 Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 15, bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial.¹²

¹¹ Diakses pada website <https://bankdki.co.id/> pada 29 Oktober 2022

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 15 Tentang Bantuan Sosial

Adapun kriteria masyarakat juga telah diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 23:

1. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan-keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum
2. Lembaga Non Pemerintah bidang Pendidikan, keamanan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.¹³

2.2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah bagan yang digunakan peneliti untuk menjelaskan hasil penelitian mengenai pengimplementasian Program Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Kelurahan Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Adanya bagan kerangka berpikir ini adalah untuk mempermudah Analisa permasalahan dalam penelitian ini.

¹³ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 23

Diagram 2. 1

